

**ANALISIS FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI SULAWESI SELATAN  
SKRIPSI**



*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis  
Universitas Hasanuddin Makassar*

**OLEH**

**FAHIRAH**

**A11108254**

**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2012**

**Lembar Pengesahan**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI SULAWESI SELATAN**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**FAHIRAH**

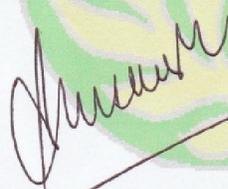
**A1108254**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin Makassar*

**DISETUJUI OLEH:**

Pembimbing I

Pembimbing II



**Drs. H. Abd.Majid Sallatu, MA**  
**NIP:194800131979031001**

**Dr. Agussalim, S.E.M.Si**  
**NIP:196708171991031006**

---

## **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul " Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan.

Penelitian ini menggunakan data time series yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu tahun 2001 – 2010. Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah Ordinary Least Square (OLS), dengan menggunakan metode regresi linear berganda dan alat yang dipakai untuk mengelola data yaitu menggunakan eviews.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.981171 yang berarti bahwa variabel- variabel bebas yaitu PDRB perkapita, Pengangguran, Inflasi, dan pengeluaran perkapita secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap jumlah penduduk miskin sebesar 98,11 persen sedangkan sisanya sebesar 1,89 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model estimasi.

***Kata Kunci : Kemiskinan, PDRB Perkapita, Pengangguran, Inflasi, Pengeluaran Perkapita***

---

## ABSTRACT

This study entitled "Analysis of Factors Affecting the Number of Poor People in South Sulawesi. This study aims to analyze the factors that influence the number of poor in South Sulawesi.

This study uses time series data obtained from the Central Statistics Agency (BPS), namely the year 2001 to 2010. The research method used in this analysis is the Ordinary Least Square (OLS), using multiple linear regression methods and tools used to manage the data that is using eviews.

The results of this study indicate that the coefficient of determination ( $R^2$ ) of 0.981171, which means that the independent variables, namely GDP per capita, unemployment, inflation, and expenditures per capita, jointly significantly affect the number of poor by 98.11 percent while the remaining 1.89 percent is explained by other variables not included in the model estimation.

**Key words: poverty, GDP per capita, unemployment, inflation, expenditures per capita.**

---

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "***Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Sulawesi Selatan***" sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Strata I Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa dorongan semangat maupun sumbangan pemikiran. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya, yaitu kepada :

1. Kedua orang tua penulis Ibu Onny Sahara tercinta dan Bapak Fathul Hadi terima kasih untuk untaian doa dan motivasi yang tiada henti yang diberikan kepada penulis Saudaraku Fadli dan Fauziah tengkyuu so much for ur cares,prays,and love to me. ^\_^\*million hugs
2. Prof.Dr.Hj.Rahmatiah,MA selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, yang telah memberikan motivasi yang luar biasa kepada penulis.

- 
3. Drs. H. Abdul Madjid Salattu, MA. Dan Dr. Agussalim, SE. M.Si selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
  4. Dr. H .Madris, DPS, M.Si, Dr. Hj. Indraswati T.A. Reviane, MA, dan Dra. Hj. Fatmawati. M.Si selaku penguji yang telah memberikan saran yang sangat berguna bagi penulis.
  5. Fitriwati Djaman S.E.M.Si selaku penasihat akademik dan Suharwan Hamzah S.E.M.Si yang telah membantu dan membimbing penulis.
  6. Sahabat-sahabat penulis Leliana, Qarina, Dian, Irene, Devy, Eva, Kalian semua terlalu manis untuk dilupakan. Terima kasih untuk segala bantuan, kerjasama, dan kenangan yang telah kalian berikan dan Stania, Bams, Uphi, Ipa, Iqa, Musya, teman teman IE 08 yang tidak dapat disebutkan satu per satu tetap berjuang teman. I'm gonna miss everyone on campus. Thanks for a great three years and eight months. love u guys :D
  7. Saudara2 seperjuangan KKN Reg. G.80 DP crew Abang Inot, Anty, Mamat beken, Rukman, Hendrik, BIG thanks tuk persaudaraan, doa dan dukungannya.
  8. Terakhir untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

---

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan, sehingga penulis tak lupa mengharapkan saran dan kritik atas skripsi ini.

Makassar, Juni 2012

**FAHIRAH**



---

## DAFTAR ISI

### HALAMAN

Halaman Pengesahan	i
Abstrak .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	8
BAB II LANDASAN TEORI .....	9
2.1 Kemiskinan .....	9
2.1.1 Pengertian Kemiskinan .....	12
2.1.2 Mengukur Kemiskinan .....	12
2.1.3 Pembangunan dan Kemiskinan .....	14
2.1.4 Penyebab Kemiskinan .....	16
2.2 Konsep Pendapatan .....	19

---

2.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	20
2.2.2 Pendapatan Perkapita.....	26
2.2.3 Hubungan Pendapatn Perkapita Terhadap Kemiskinan .....	26
2.3 Pengangguran .....	27
2.3.1 Pengertian Pengangguran .....	27
2.3.2 Jenis Pengangguran .....	28
2.3.3 Dampak Pengangguran .....	33
2.3.4 Hubungan Pengangguran dan kemiskinan .....	36
2.4 Inflasi .....	35
2.4.1 Pengertian Inflasi .....	37
2.4.2 Macam- macam Inflasi .....	40
2.4.3 Dampak Inflasi .....	41
2.4.4 Hubungan Inflasi dan kemiskinan.....	45
2.5 Konsep Pengeluaran .....	46
2.5.1 Konsumsi/Pengeluaran .....	47
2. 5.2 Hubungan Pengeluaran Perkapita Terhadap Kemiskinan.....	49
2.6 Kerangka Pemikiran .....	49
2.7 Hipotesis .....	51
BAB III METODE PENELITIAN .....	52
3.1 Ruang Lingkup Daerah Penelitian .....	52
3.2 Jenis Sumber Data .....	52
3.3 Metode dan Teknik Pengumpulan Data .....	52

---

3.4 Pengolahan Data .....	53
3.5 Model Analisis Data .....	53
3.6 Uji Kesesuaian .....	54
3.6.1 Koefisien Determinasi (R-Square).....	54
3.6.2 Uji t- Statistik .....	55
3.6.3 Uji F- Statistik .....	56
3.7 Defenisi Operasional .....	57
BAB IV PEMBAHASAN .....	59
4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	59
4.1.1 Kondisi Geografis.....	59
4.1.2 Kondisi Demografis .....	60
4.1.3 Penduduk Miskin.....	61
4.1.4 Perkembangan PDRB Perkapita Sulawesi Selatan .....	64
4.1.5 Perkembangan Tingkat Pengangguran Sulawesi Selatan .....	66
4.1.6 Perkembangan Inflasi di sulawesi Selatan.....	68
4.1.7 Pengeluaran Perkapita .....	69
4.2 Uji Hipotesis .....	72
4.2.1 Koefisien Determinasi .....	72
4.2.2 Uji Statistik F .....	72
4.2.3 Uji Statistik T .....	73
4.3 Uji analisis Regresi Berganda .....	74
4.4 Analisis dan Implikasi.....	76

---

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....80

5.1 Kesimpulan .....80

5.2 Saran.....81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



---

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 : Kemiskinan menurut Keb/ Kota Sul-Sel thn 2001-2010 .....	4
Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Provinsi Sul-Sel thn 2001-2010.....	60
Tabel 4.2 : Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sul-Sel thn 2001-2010.	63
Tabel 4.3 : PDRB Perkapita Atas dasar Harga Berlaku Sul-Sel thn 2001-2010	65
Tabel 4.4 : laju Inflasi Sul-Sel thn 2001-2010.....	69
Tabel 4.6 : Pengeluaran perkapita Perbulan Rumah Tangga SulSel.....	71
Tabel 4.7 : Hasil Regresi Linear Berganda.....	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1 : Tingkat Kemiskinan Provinsi tahun 2010.....	3

---

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir .....49

Gambar 4.1: Grafik Pengangguran Terbuka Sul-Sel thn 2001-2005.....67

Gambar 4.2 : Grafik Pengangguran Terbuka Sul-Sel thn 2006-2010.....67



---

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern. Ekonom-ekonom Bank Dunia Ahluwalia, Carter, dan Chenery menyimpulkan bahwa, hampir 40 persen dari penduduk di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia hidup dalam tingkat kemiskinan absolut yang dibatasi pengertiannya dalam hubungannya dengan tingkat pendapatan yang kurang mencukupi untuk menyediakan kebutuhan gizi makanan yang memadai. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti *proper*, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin

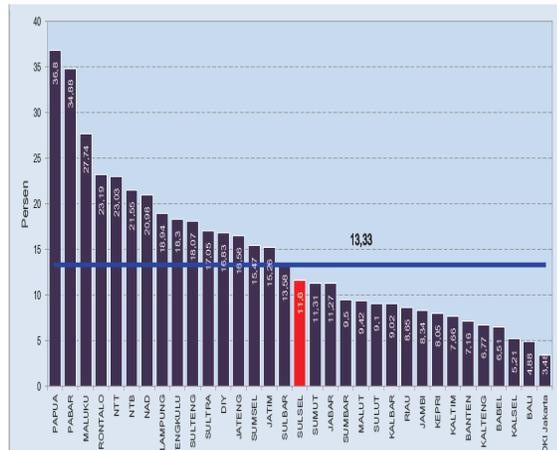
---

kelangsungan hidup. Dalam arti luas, Chamber (Suryawati;2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Menurut BPS (2007), seseorang masuk dalam kriteria miskin jika pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan.

Kebijakan pembangunan terus dilanjutkan dan ditingkatkan yaitu pemerataan pembangunan dan hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional dan regional yang sehat dan dinamis. Namun dalam keberhasilan pembangunan nasional selama ini masih ditemui beberapa aspek kehidupan masyarakat yang belum banyak tersentuh oleh pembangunan. Diantara aspek kehidupan masyarakat yang belum terjamah secara tuntas adalah masalah kemiskinan yang terjadi dimana-mana. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya mempunyai 49,5 juta jiwa penduduk yang tergolong miskin (Survei Sosial Ekonomi Nasional / Susenas 2010) telah mencatat penurunan yang luar biasa dalam tingkat kemiskinan dibandingkan dengan pencapaian pada negara-negara sedang berkembang lainnya. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2010 sebesar 31,02 juta

jiwa . Penduduk miskin tersebut terdiri dari 11,10 juta jiwa ( 9,87 persen) di perkotaan dan 19,93 juta jiwa (16,56 persen) di perdesaan.

**Gambar 1.1 : Tingkat kemiskinan Provinsi (%) Tahun 2010**



**Sumber : Badan Pusat Statistik, 2011**

Masalah kemiskinan di Indonesia cukup rumit karena luas wilayah, beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat, dan pengalaman kemiskinan yang berbeda. Selain itu, masalah kemiskinan juga bersifat multidimensional karena bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, tetapi juga kerentanan dan kerawanan untuk menjadi miskin, kegagalan dalam pemenuhan hak dasar, dan adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat (Agussalim; 2009).

Disamping persoalan diatas, penyebab kemiskinan juga berkisar pada fenomena "Lingkaran Setan Kemiskinan". Pendapatan rendah, pendidikan rendah, gizi pun tak terpenuhi, lalu pertumbuhan tidak jalan, mutu modal manusia tidak baik, cara berfikir menjadi kurang kreatif dan tidak produktif sehingga pengangguran meningkat, dan pendapatan

rendah. Terlihat disini bahwa persoalan berputar-putar terus disitu. Dan lingkaran setan itu jika akhirnya terjadi juga pada keturunan mereka maka semakin sulitlah keluar dari kemiskinan.

**Tabel 1.1 Kemiskinan menurut kabupaten/Kota Sulawesi Selatan  
Tahun 2009-2010**

Daerah	Garis Kemiskinan (Rp/bulan)		Persentase penduduk miskin (%)		Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Selayar	180 355	203 726	16,41	14,41	14,98	19,834
Bulukumba	177 859	200 907	10,50	9,02	41 122	35 594
Bantaeng	142 972	161 499	9,96	10,24	17 211	18 116
Jeneponto	188 731	213 188	20,58	19,09	68 219	65 322
Takalar	179 994	203 319	11,06	11,16	28 325	30 026
Gowa	1295 452	220 780	10,93	9,49	67013	612 882
Sinjai	169 415	189 004	11,37	10,68	257666	24 444
Maros	212 544	237 119	16,35	14,62	49777	46 522
Pangkajene	185 923	207 420	19,35	19,26	57 367	58 872
Barru	194 138	216 585	11,43	10,68	18 476	17 716
Bone	167 601	189 320	15,19	14,08	107 271	100 990
Soppeng	170 178	180 352	9,95	10,41	22 784	23 298
Wajo	196 543	208 293	8,93	8,96	33 770	34 473
Sidenreng	185 330	196 410	8,70	6,99	16 857	19 001
Pinrang	176 376	186 920	18,10	9,01	30 320	31 631
Enrekang	190 151	204 861	16,14	16,84	34 239	32 023
Luwu	184 095	198 363	16,40	15,43	55 227	51 363
Tana toraja	172 445	185 785	16,14	14,61	75 240	32 409
Luwu utara	192 085	206 944	16,40	16,24	52 455	46 708
Luwu timur	184 242	198 494	8,91	9,18	21 013	22 296
Toraja utara		249 111		19,08		41 087
Kota makassar	209 582	233 815	5,52	5,86	69 667	78 467
Kota pare- pare	188 525	199 796	6,52	6,53	7 685	8 445
Kota palopo	185 464	199 811	11,85	11,28	17 260	16 702
Sulawesi Selatan	153 715	163 089	12,31	11,6	936 898	915 660
Indonesia	200 262	211 726	14,15	13,33	32.530.000	31.023390

Sumber : Badan Pusat Statistik

---

*Badan Pusat Statistik (BPS)* merilis jumlah penduduk miskin di Sulsel per Maret 2010 tercatat sebesar 11,6% dari jumlah penduduknya atau sebesar 913,4 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut, 13,0% berada di daerah perkotaan sedangkan sisanya berada di daerah pedesaan. Mereka kebanyakan hidup dari buruh tani atau tak memiliki pekerjaan yang tak menentu. Mereka tak memenuhi standar pendapatan Rp152 ribu per bulan perkapita,". Persentase pangsa jumlah penduduk miskin di perkotaan tersebut relatif tetap dibanding Maret 2009 yang tercatat sebesar 12,9% dari jumlah penduduk miskin pada tahun tersebut. Dari sisi jumlah, jumlah penduduk miskin di Sulsel mengalami penurunan, dari 963,6 ribu per Maret 2009 menjadi 913,4 ribu pada Maret 2010, atau menurun 5,2%, sementara pada tahun 2009 turun sebesar 6,6%. Penurunan jumlah penduduk miskin tertinggi terjadi di pedesaan sebesar 5,3%, dari 839,1 ribu orang pada Maret 2009 menjadi 794,2 ribu orang. Jumlah tersebut relatif masih cukup besar, yaitu sekitar 10,1% dari total penduduk Sulsel. Penurunan jumlah penduduk miskin juga terjadi di perkotaan yang tercatat menurun sebesar 4,3%, dari 124,5 ribu orang menjadi 119,2 ribu orang. Jumlah penduduk miskin perkotaan tersebut tercatat sebesar 1,5% dari total penduduk Sulsel.

Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin yang tinggi, pada tahun 2008, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan berjumlah 32,53 juta (13,3 persen) jiwa. Akan tetapi jumlah ini mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya. Hal ini

---

disebabkan dengan adanya program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Program ini meliputi pengentasan kemiskinan melalui bantuan instan berupa kebutuhan dasar hidup, pelayanan kesehatan, pendidikan gratis, dan pemberdayaan masyarakat berupa program kemanfaatan kredit usaha mikro, kecil dan menengah.

Provinsi Sulawesi Selatan dalam periode 2008-2010 terjadi fenomena penurunan tingkat kemiskinan, tetapi rata-rata tingkat kemiskinannya dibanding provinsi-provinsi lain di Indonesia masih terbilang tinggi. Hal ini bisa terlihat dari tidak masuknya Provinsi Sulawesi Selatan dalam 16 provinsi teratas dalam hal penurunan angka kemiskinan Ke-16 provinsi yang mengalami angka penurunan kemiskinan secara signifikan tersebut adalah provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Bengkulu, Gorontalo, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat, Sumatra Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan provinsi ke- 33 hasil pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2004. (*Mahaji Noesa;2012*)

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor –faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan, dalam judul skripsi “ **Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Sulawesi Selatan**”

---

## **1.2 Perumusan masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh PDRB perkapita terhadap jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan ?
2. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan?
3. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan?
4. Bagaimana pengaruh Pengeluaran perkapita terhadap jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1.3.1** Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PDRB perkapita terhadap jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan.
4. Untuk mengetahui seberapa besar Pengeluaran perkapita terhadap jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan.

---

1.3.2. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi pihak pemerintah daerah Sulawesi Selatan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk pengentasan kemiskinan di Sulawesi Selatan
2. Sebagai bahan studi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar
3. Dapat menjadi masukan bagi peneliti – peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis.



---

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kemiskinan

##### 2.1.1 Pengertian Kemiskinan

Definisi tentang kemiskinan telah mengalami perluasan, seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang melingkupinya. Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi melainkan telah meluas hingga ke dimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan politik. Menurut *Badan Pusat Statistik*, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah untuk konsumsi orang perbulan. Sedangkan bagi dinas sosial mendefinisikan orang miskin adalah mereka yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka yang layak bagi kemanusiaan dan mereka yang sudah mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Definisi kemiskinan menurut *UNDP* (United Nations Development Programme) Badan Program Pembangunan adalah ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan hidup, antara lain

---

dengan memasukkan penilaian tidak adanya partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik sebagai salah satu indikator kemiskinan.

*Bappenas (2004)* mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara, pemahaman utamanya mencakup:

1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
2. Gambaran tentang kebutuhan sosial termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

---

3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna memadai di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Selanjutnya, *Agussalim* (2000) dalam bukunya “mereduksi kemiskinan” menjelaskan bahwa kemiskinan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, seperti tingkat keparahan dan penyebab. Berdasarkan tingkat keparahan kemiskinan dapat dibedakan atas kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya lebih rendah daripada garis kemiskinan absolut. Dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut tersebut.

*Deklarasi Copenhagen* menjelaskan kemiskinan absolut sebagai sebuah kondisi yang dicirikan dengan kekurangan parah pada kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan, rumah, pendidikan, dan informasi. Kemiskinan relatif adalah perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok miskin, kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi daripada garis kemiskinan, dan kelompok masyarakat yang relatif lebih kaya. Sedangkan berdasarkan penyebab kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural. kemiskinan alamiah terjadi karena kegagalan individu atau lingkungan fisik sebagai objeknya hingga

---

seseorang menjadi sulit dalam melakukan usaha atau mendapatkan pekerjaan. Dilihat dari individu, kemiskinan terjadi kemalasan, kurangnya keterampilan, kelemahan fisik, dan rendahnya respons dalam melihat perubahan di sekitarnya. Sedangkan dilihat dari lingkungan kemiskinan dapat merupakan akibat dari lingkungan atau alam yang tidak mendukung, kegagalan dalam mendapatkan sumberdaya, dan perkembangan teknologi yang sangat rendah. Dan Kemiskinan struktural melihat kemiskinan sebagai bahan relatif, dimana terdapat sekelompok masyarakat yang miskin sementara kelompok lainnya tidak miskin.

### **2.1.2 Mengukur Kemiskinan**

Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut.

### **2.1.3 Pengukuran Kemiskinan Absolut**

Di Indonesia, ukuran kemiskinan sering kali didasarkan pada pendekatan yang digunakan oleh BPS. Penduduk miskin ditentukan berdasarkan jumlah pengeluaran kebutuhan pokok atau tingkat konsumsi per kapita dibawah suatu standar tertentu yang disebut garis kemiskinan (poverty line). Mereka yang berada dibawah garis kemiskinan tersebut dikategorikan sebagai orang miskin. Untuk kepentingan studi empiris

---

biasanya digunakan tiga indikator kemiskinan absolut (absolute poverty) (Adams, 2003; Kray, 2004) dalam Agussalim, 2009; yaitu :

✚ **Poverty Headcount Index** (PHI) yaitu, persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.

✚ **Poverty Gap Index** (PGI), mengukur selisih antara persentase rata-rata pengeluaran (pendapatan) penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

✚ **Poverty Severity Index** (PSI) yaitu mengukur kedalaman atau keparahan kemiskinan. Indeks ini tidak lain adalah PGI yang dikuadratkan sehingga sering disebut square poverty gap index. indeks ini pada prinsipnya sama dengan PGI, namun selain mengukur selisih atau jarak yang memisahkan orang miskin dengan garis kemiskinan, juga mengukur ketimpangan diantara penduduk miskin atau penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

#### **2.1.4 Pengukuran Kemiskinan Relatif (Ketimpangan)**

(Agussalim, 2009), Ketimpangan merupakan konsep yang lebih luas dibandingkan dengan kemiskinan karena tidak hanya fokus pada penduduk yang miskin (berada dibawah garis kemiskinan) tetapi mencakup seluruh penduduk, mulai dari yang paling miskin hingga yang paling kaya. Konsep ini memperlihatkan berapa persen pendapatan (pengeluaran) masing- masing kelompok penduduk tersebut (biasanya

---

dibagi atas 5 atau 10 kelompok) terhadap total pendapatan (pengeluaran). Penduduk yang berada pada kelompok terbawah diidentifikasi sebagai orang miskin.

(*Todoro, 2003*) para ahli ekonomi membedakan antara dua ukuran utama distribusi pendapatan yakni :

- ✚ **Distribusi pendapatan fungsional** atau distribusi bagian faktor, menjelaskan bagian dari total pendapatan nasional yang diterima oleh masing- masing faktor produksi berdasarkan kontribusi yang diberikan faktor tersebut pada suatu proses produksi.
- ✚ **Distribusi pendapatan perseorangan** atau besaran pendapatan, distribusi pendapatan ini menyangkut orang per orang atau rumah tangga dan total pendapatan yang mereka terima.

Di Indonesia, perhitungan distribusi pendapatan didasarkan pada data Survei Sosial Ekonomi nasional (*susenas*) yang dilakukan sekali dalam tiga tahun.

### **2.1.5 Pembangunan dan Kemiskinan**

Pembangunan ekonomi berhubungan erat dengan masalah kemiskinan sebab tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat atau pemerataan kesejahteraan. dengan kata lain pembangunan bertujuan mengentaskan kemiskinan.

Menurut Emil Salim (1976) masalah pokok yang dihadapi oleh pedesaan di Indonesia adalah kemiskinan dan keterbelakangan. Keadaan ini ditandai oleh :

- 
- ✚ Pendapatan yang rendah dari sebagian besar penduduk pedesaan.
  - ✚ Terdapatnya kesenjangan antara golongan kaya dan miskin dalam usaha-usaha pembangunan sehingga disinyalir kondisi-kondisi tersebut kurang menguntungkan dalam mempercepat laju pertumbuhan.

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia pada umumnya melanda penduduk yang tinggal di pedesaan. Salah satu golongan miskin di pedesaan adalah mereka yang termasuk kategori petani kecil yang bertempat tinggal di daerah yang terisolir dengan kondisi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kurang menguntungkan. Petani kecil yang hidup dalam kemiskinan tersebut umumnya memiliki lahan pertanian yang sempit. Kecilnya luas lahan yang dimiliki mengakibatkan mereka sangat sulit meningkatkan taraf hidupnya.

Dari waktu ke waktu jumlah penduduk miskin ini semakin berkurang di daerah pedesaan sementara jumlah penduduk miskin dikota semakin banyak. Hal ini disebabkan banyak penduduk miskin dari desa yang pergi ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Akibatnya mereka bekerja di sektor informal perkotaan seperti pedangang kako lima, pedangan asongan, pemulung, gelandangan, dan sebagainya. Sebagian dari profesi ini membuat mereka tetap tergolong miskin.

---

### 2.1.6 Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan banyak dihubungkan dengan penyebab individual, atau patologis yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari sisi orang miskin itu sendiri. penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga; penyebab sub-budaya (*subcultural*) , yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar; penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi; penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil struktur sosial (*The World Bank, 2007*). Beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu Emil Salim (1976) :

1. *Policy induces processes*, yaitu proses kemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan (*induced of policy*) diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.
2. *Socio-economic Dualism*, yaitu negara ekskoloni yang mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marginal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.

---

3. *Population Growth*, yaitu perspektif yang didasari pada teori Malthus bahwa penambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan penambahan pangan seperti deret hitung.

4. *Resources management and The Environment*, yaitu adanya unsur misalnya manajemen sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.

5. *Natural Cycles and Processes*, yaitu kemiskinan yang terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal di lahan kritis, dimana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir tetapi jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal terus-menerus.

6. *The Marginalization of Woman*, yaitu peminggiran kaum perempuan karena perempuan masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari laki-laki.

7. *Cultural and Ethnic Factors*, yaitu bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya, pola hidup konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat-istiadat yang konsumtif saat upacara adat-istiadat keagamaan.

8. *Exploitative Intermediation*, yaitu keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir (lintah darat)

---

9. *Internal Political Fragmentation and Civil strife*, yaitu suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya yang kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.

10. *International Processes*, yaitu bekerjanya sistem-sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi semakin miskin.

Selain beberapa faktor di atas, penyebab kemiskinan di masyarakat khususnya di pedesaan disebabkan oleh keterbatasan asset yang dimiliki, yaitu:

- ✚ **Natural Assets**; seperti tanah dan air, karena sebagian besar masyarakat desa hanya menguasai lahan yang kurang memadai untuk mata pencahariannya.
- ✚ **Human Assets**; menyangkut kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan (tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan maupun tingkat kesehatan dan penguasaan teknologi).
- ✚ **Physical Assets**; minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum seperti jaringan jalan, listrik dan komunikasi.
- ✚ **Financial Assets**; berupa tabungan (*saving*), serta akses untuk memperoleh modal usaha.

---

✚ **Social Assets**; berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam hal ini kekuatan *bargaining position* dalam pengambilan keputusan-keputusan politik.

## 2.2 Konsep Pendapatan

Tolak ukur yang paling banyak dipakai untuk mengukur keberhasilan sebuah perekonomian antara lain pendapatan nasional, produk nasional, tingkat kesempatan kerja, tingkat harga, dan posisi neraca pembayaran luar negeri. Salah satu terjadinya alokasi yang efisien secara makro adalah nilai output nasional yang dihasilkan sebuah perekonomian pada suatu periode tertentu. Sebab, besarnya output nasional dapat menunjukkan hal penting dalam sebuah perekonomian.

*Pertama*, besarnya output nasional merupakan gambaran awal seberapa efisien sumber-sumber daya yang ada dalam perekonomian (tenaga kerja, barang modal, uang, dan kemampuan kewirausahaan) digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Maka semakin besar pendapatan nasional suatu negara, semakin baik efisiensi alokasi sumber daya ekonominya.

*Kedua*, besarnya output nasional merupakan gambaran awal tentang produktivitas dan tingkat kemakmuran suatu negara. Dimana alat ukur yang dipakai untuk mengukur kemakmuran adalah output nasional perkapita. Nilai output perkapita diperoleh dengan cara membagi besarnya output nasional dengan jumlah penduduk pada tahun yang

---

bersangkutan. Jika angka output pendapatan semakin besar, maka tingkat kemakmuran dianggap semakin tinggi.

*Ketiga*, besarnya output nasional merupakan gambaran awal tentang masalah-masalah struktural yang (mendasar) yang dihadapi suatu perekonomian. Jika sebagian besar output nasional dinikmati oleh sebagian kecil penduduk maka perekonomian tersebut mempunyai masalah dengan distribusi pendapatannya.

Selain perhitungan pendapatan nasional, perhitungan pendapatan suatu daerah (region) diperlukan guna mengetahui perbedaan pembangunan yang dilaksanakan antara suatu daerah dengan daerah lainnya.

### **2.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Pendapatan regional adalah tingkat (besarnya) pendapatan masyarakat pada wilayah analisis. Menganalisis suatu region atau membicarakan pembangunan regional tidak mungkin terlepas dari membahas tingkat pendapatan wilayah maupun pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut. Pembangunan wilayah haruslah bersangkut paut dengan peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut, yaitu yang dimaksud adalah pendapatan rata-rata (*income per capita*) masyarakat (Tarigan, 2005).

Produk Domestik regional Bruto ( PDRB ) adalah jumlah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Atau apabila

---

ditinjau dari segi pendapatan merupakan jumlah dari pendapatan yang diterima oleh faktor- faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk di wilayah tersebut yang ikut serta dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu (*Hadibroto, dkk;1973*).

Hasil perhitungan PDRB disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Perhitungan atas dasar berlaku (*at currebnt Prince*) merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam suatu periode tertentu, biasanya dalam satu tahun yang dinilai dengan harga tahun yang bersangkutan. Pada perhitungan atas dasar harga berlaku belum menghilangkan faktor inflasi, jadi faktor inflasi masih terdapat didalamnya.

Perhitungan atas dasar konstan (*at constant Prince*) menggambarkan perubahan volume/ kuantum produksi saja. Pengaruh perubahan harga telah dihilangkan dengan cara menilai dengan harga satu tahun dasar tertentu. Pada perhitungan atas dasar harga konstan ini, faktor inflasi dihilangkan. Perhitungan atas harga konstan berguna untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau sektoral.

Ada beberapa cara lain yang lazim digunakan dalam perhitungan pendapatan suatu daerah yakni:

**a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga pasar**

PDRB suatu daerah diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen

---

faktor pendapatan (upah,gaji,bunga,sewa tanah,dan keuntungan) penyusutan serta pajak tidak langsung. Upah/gaji adalah balas jasa dari faktor tenaga kerja,bunga adalah balas jasa dari modal,sewa adalah balas jasa dari faktor produksi tanah, dan keuntungan (profit) adalah balas jasa dari entrepreneurship (kewirausahaan).

**b. Produk Domestik Regional Netto** atas dasar harga pasar

Perbedaan antara konsep “netto” dan konsep “bruto” adalah karena pada bruto, faktor penyusutan masih termasuk didalamnya, sedangkan pada konsep netto penyusutan telah dikeluarkan. Penyusutan yang dimaksud disini adalah nilai susut barang-barang modal yang terjadi selama ikut serta dalam produksi. Jika nilai susut barang-barang modal dari seluruh sektor ekonomi dijumlahkan, maka hasilnya merupakan penyusutan yang di maksud diatas.

**c. Produk Domestik Regional Bruto Netto** atas dasar biaya faktor

Perbedaan antara konsep biaya faktor dan konsep harga pasar di atas adalah karena adanya pajak tidak langsung yang dipungut oleh pemerintah dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada unit-unit produksi. Pajak tidak langsung ini meliputi pajak penjualan, biaya ekspor/impor, bea cukai, dan lain-lain pajak kecuali pajak pendapatan dan pajak perseroan. Pajak tidak langsung oleh unit produksi dibebankan pada biaya produksi atau pembeli hingga pajak tidak langsung berakibat menaikkan harga barang. Berbeda dengan pajak tidak

---

langsung, sebaliknya subsidi yang diberikan pemerintah kepada unit-unit produksi pada dasarnya akan membawa pengaruh penurunan harga jadi pajak tidak langsung dan subsidi mempunyai pengaruh yang sama terhadap harga barang.

Dengan demikian apabila pajak tidak langsung dikurangi subsidi akan diperoleh pajak tidak langsung netto. Jika produk domestik regional netto atas dasar harga pasar dikurangi pajak tidak langsung netto maka akan diperoleh produk domestik regional netto atas dasar biaya faktor.

### **1. Pendapatan Regional**

Dari konsep-konsep diatas, dapat diketahui bahwa produk domestik regional netto atas dasar biaya faktor sebenarnya merupakan jumlah kontra perstasi faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di wilayah tersebut, atau merupakan jumlah dari pendapatan yang berupa upah, gaji, bunga, sewa, dan keuntungan yang timbul dari wilayah tersebut. Akan tetapi, pendapatan yang dihasilkan tidak seluruhnya merupakan pendapatan penduduk dari daerah tersebut sebab ada sebagian pendapatan yang diterima oleh pendapatan wilayah lainnya. Misalnya suatu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh orang luar, tapi perusahaan tadi beroperasi di wilayah tersebut, maka dengan sendirinya keuntungan perusahaan itu sebagian akan menjadi milik orang lain yaitu milik orang yang memiliki modal tersebut. Sebaliknya kalau ada penduduk daerah ini yang menanamkan modalnya diluar daerah maka sebagian

---

keuntungan perusahaan tersebut mengalir ke dalam wilayah tersebut dan menjadi pendapatan modal.

Pendapatan regional dapat dihitung melalui dua metode yaitu metode langsung dan metode tak langsung. Metode langsung adalah perhitungan dengan menggunakan data daerah atau data asli yang menggambarkan kondisi daerah dan digali dari sumber data yang ada di daerah itu sendiri. Hal ini berbeda dengan metode tidak langsung, yang menggunakan data dari sumber nasional yang dialokasikan ke masing-masing daerah. Metode langsung dapat dilakukan dengan menggunakan tiga macam cara yaitu :

✚ **Pendekatan produksi**, perhitungan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan/sector ekonomi dengan cara mengurangi biaya antara total nilai produksi bruto sector atau sub sector. Pendekatan ini banyak digunakan untuk memperkirakan nilai tambah dari sector yang diproduksinya berbentuk fisik. barang seperti pertanian, pertambangan, dan industri dan sebagainya. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi (output) dan nilai biaya antara (*intermedate cost*) yaitu bahan baku/penolong dari luar yang dipakai dalam proses produksi.

✚ **Pendekatan pendapatan**, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yaitu upah dan gaji serta surplus usaha, penyusutan, dan pajak tidak langsung netto. Pada sector

---

pemerintah dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung surplus usaha tidak diperhitungkan. Surplus usaha meliputi bunga yang dibayarkan netto, sewa tanah, dan keuntungan. Metode pendekatan pendapatan banyak dipakai pada sektor jasa, tetapi tidak dibayarkan setara dengan harga pasar, misalnya sektor pemerintahan. Hal ini disebabkan kurang lengkapnya data dan tidak dipakainya metode yang akurat yang dapat dipakai dalam mengukur nilai produksi dan biaya dari berbagai kegiatan jasa, terutama kegiatan yang tidak mengutip biaya. Kutipan sering kali tidak menggambarkan harga yang sebenarnya untuk pelayanan yang mereka berikan misalnya sektor pendidikan dan rumah sakit.

**➤ Pendekatan pengeluaran**, pendekatan dari segi segi pengeluaran adalah menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Kalau dilihat dari segi penggunaan maka total penyediaan produksi barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), perubahan stok, dan ekspor netto.

**Metode tidak langsung** adalah suatu cara mengalokasikan produk domestik bruto dari wilayah yang lebih luas ke masing-masing bagian wilayah, misalnya mengalokasikan PDB Indonesia ke setiap provinsi dengan menggunakan alokator tertentu, alokator yang digunakan yaitu (1) nilai produksi bruto atau netto setiap sektor, subsektor pada wilayah yang dialokasikan, (2) jumlah produksi fisik, (3) penduduk, (4) tenaga kerja, dan (5)

---

alokator tidak langsung lainnya . Dengan memperhitungkan salah satu kombinasi dari beberapa alokator dapat diperhitungkan persentase bagian masing-masing provinsi terhadap nilai tambah setiap sektor dan subsektor.

### **2.2.2 Pendapatan perkapita**

Pendapatan perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk sebagai hasil dari proses produksi. Pendapatan perkapita sering menjadi tolak ukur kemakmuran suatu negara atau daerah. Pendapatan perkapita pada dasarnya mengukur kemampuan dari suatu negara untuk memperbesar output dalam laju yang lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk. Tingkatan dan laju pertumbuhan pendapatan perkapita riil (yakni sama dengan pertumbuhan pendapatan perkapita setelah dikurangi dengan tingkat inflasi) merupakan tolak ukur ekonomis yang paling sering digunakan untuk mengukur sejauh mana kemakmuran ekonomis dari suatu negara.

Berdasarkan tolak ukur tersebut, maka akan dimungkinkan untuk mengetahui seberapa banyak barang dan jasa riil yang tersedia bagi rata-rata penduduk untuk melakukan kegiatan konsumsi dan investasi.

### **2.2.3 Hubungan PDRB Per kapita terhadap Kemiskinan**

*Menurut Sadono Sukirno (2000)*, laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara

---

keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.

Pendapatan per kapita memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat diberbagai negara dan juga dapat menggambarkan perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi di antara berbagai negara (*Lincoln Arsyad, 1999*). Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah (*Thamrin, 2000*). Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang.

## **2.3 Pengangguran**

### **2.3.1 Pengertian Pengangguran**

*Nanga (2001; 249)* mendefinisikan Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (*labor force*) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi secara aktif mencari pekerjaan tidak dapat digolongkan sebagai penganggur. Untuk mengukur

---

pengangguran dalam suatu negara biasanya digunakan apa yang dinamakan tingkat pengangguran (*unemployment rate*). Yaitu jumlah penganggur dinyatakan sebagai persentase dari total angkatan kerja (*labor force*). Sedangkan angkatan kerja itu sendiri adalah jumlah orang yang bekerja dan tidak bekerja, yang berada dalam kelompok umur tertentu.

Pengangguran prinsipnya mengandung arti hilangnya output (*loss of output*) dan kesengsaraan bagi orang yang tidak bekerja (*human misery*), dan merupakan suatu bentuk pemborosan sumberdaya ekonomi. Disamping memperkecil output, pengangguran juga memacu pengeluaran pemerintah lebih tinggi untuk keperluan kompensasi pengangguran dan kesejahteraan.

### 2.3.2 Jenis Pengangguran

Dilihat dari sebab timbulnya, pengangguran dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis sebagai berikut :

- ✚ **Pengangguran fraksional atau transisi** (*frictional or transisional unemployment*) adalah jenis pengangguran yang timbul karena sebagai akibat dari adanya perubahan di dalam syarat- syarat kerja yang terjadi seiring dengan perkembangan atau dinamika ekonomi yang terjadi. Jenis pengangguran ini dapat pula terjadi karena berpindahannya orang- orang dari satu daerah ke daerah lain, atau dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, atau melalui berbagai tingkat siklus kehidupan yang

---

berbeda. pengangguran fraksional adalah pengangguran yang terjadi sebagai hasil dari pergerakan individual antara bekerja dan mencari pekerjaan baru (*Dornbusch, et.al.2001*). Terdapat tiga golongan penganggur yang dapat diklasifikasikan sebagai pengangguran fraksional (*Sukirno, 2000*) yaitu :

1. Tenaga kerja yang baru pertama sekali mencari kerja. Setiap tahun terdapat golongan penduduk yang mencapai usia yang tergolong sebagai angkatan kerja. disamping itu pelajar dan sarjana yang baru menyelesaikan pelajarannya juga akan aktif mencari kerja.
2. Pekerja yang meninggalkan kerja dan mencari kerja baru. Pada ketika perekonomian mencapai tingkat kegiatan yang sangat tinggi terdapat perusahaan yang mendapat masalah untuk mendapat pekerja. Ini akan mendorong orang-orang yang sedang bekerja untuk meninggalkan pekerjaannya, untuk mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan pribadinya atau untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi.
3. Pekerja yang memasuki lagi pasaran buruh. Terdapat golongan pekerja dahulu telah bekerja tetapi meninggalkan angkatan kerja, memutuskan untuk bekerja kembali.

---

✚ **Pengangguran Struktural** (*Structural unemployment*)

Jenis pengangguran yang terjadi sebagai akibat adanya perubahan di dalam struktur pasar tenaga kerja yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Ketidakseimbangan di dalam pasar tenaga kerja yang terjadi antara lain karena adanya peningkatan permintaan atas satu jenis pekerjaan, sementara jenis pekerjaan lainnya permintaannya mengalami penurunan, dan penawaran itu sendiri tidak dapat melakukan penyesuaian dengan cepat terhadap penyesuaian tersebut (*Samuelson dan Nordhaus, 1992*).

✚ **Pengangguran alamiah** (*natural unemployment*) atau lebih dikenal dengan tingkat pengangguran alamiah (*natural rate of unemployment*) adalah tingkat pengangguran yang terjadi pada kesempatan kerja penuh (*Sachs and Larrain; 1993*) atau tingkat pengangguran dimana inflasi yang diharapkan (*expected inflation*) sama dengan tingkat inflasi aktual (*actual inflation*). *Milton Friedman (1968)* mendefinisikan tingkat pengangguran alamiah sebagai tingkat pengangguran dimana tekanan ke atas (*pressure*) dan tekanan ke bawah (*downward pressure*) terhadap inflasi harga dan upah berada dalam keseimbangan.

✚ **Pengangguran siklis atau konjungtual** (*cyclical unemployment*)

adalah jenis pengangguran yang terjadi sebagai akibat merosotnya kegiatan ekonomi atau karena terlampau kecilnya

---

permintaan agregat didalam perekonomian dibandingkan penawaran agregat. Pengangguran siklis merupakan pengangguran diatas tingkat alamiah terjadi ketika output berada di bawah tingkat kesempatan kerja penuh (*Dombusch dan Fischer; 1996*).

*Edgar O. Edwards (Todaro;1995)* membedakan lima bentuk kurangnya pemanfaatan tenaga kerja sebagai berikut :

1. **Pemekerja terbuka**, baik yang sukarela (Yaitu orang –orang yang tidak dimasukkan kedalam pertimbangan beberapa pekerjaan yang dapat dipakai untuk mengklasifikasikan mereka, termasuk beberapa sarana pendukung lain dari aspek pemekerjaan) dan yang tidak sukarela.
2. **Semi- Pengangguran**. Mereka yang bekerja sedikit (perharinya, per Minggu-nya atau permusimnya) padahal mereka ingin bekerja lebih banyak dan lebih lama.
3. **Tampaknya aktif tapi kurang dimanfaatkan**, yaitu mereka yang tidak tergolong sebagai pengangguran maupun semi pengangguran berdasarkan batasan tersebut diatas. Mereka sebenarnya bekerja tetapi berdasarkan alternatif yang berkaitan dengan waktu tertentu (*marking time*) yang meliputi :
  - a. Semi-Pengangguran tersamar (*Disguised underemployment*), yaitu mereka yang bekerja dibidang pertanian atau sebagai pegawai pemerintahan secara purna- waktu walaupun untuk menyelesaikan

---

pekerjaan tersebut sebenarnya tidak memerlukan waktu secara purna-waktu. Tekanan atau desakan sosial yang dialami oleh industri-industri swasta mungkin akan mengakibatkan pula adanya semi pengangguran tersamar.

- b. Semi- pengangguran tersembunyi (*hidden unemployment*) yaitu mereka yang terlibat dalam aktivitas non- pekerjaan 'pilihan kedua' berangkat karena pendidikan dan keterkaitan-keterkaitan keluarga, terutama karena kesempatan kerja yang tidak tersedia (a) pada tingkat pendidikan yang telah ditempuhnya atau (b). Untuk wanita pada nilai- nilai sosial tertentu.
- c. Masa pensiun dini (*the prematurely retired*). Fenomena ini terdapat terutama dikalangan para pegawai pemerintahan. Pensiun dini yang terjadi sebelum waktunya ini dimaksudkan untuk memenuhi desakan banyak karyawan dari bawah yang terhambat memperoleh promosi.
- d. Yang mengalami hambatan secara jasmani (*the impaired*), yaitu mereka yang bekerja purna- waktu tetapi intensitas pekerjaannya amat rendah karena tidak adanya jaminan kesehatan dan makanan yang bergizi.
- e. Yang tidak produktif (*the unproductive*), yaitu mereka yang sesungguhnya dapat menyediakan sumberdaya yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan- pekerjaan yang produktif, tetapi yang bekerja sepanjang waktu dengan menggunakan sumber daya

---

tambahan yang kurang mencukupi untuk memberikan masukan-masukan guna memenuhi kebutuhan pokok.

### **2.3.3 Dampak Pengangguran**

Pengangguran yang terjadi di dalam suatu perekonomian dapat membawa dampak atau akibat buruk, baik terhadap perekonomian maupun individu dan masyarakat.

#### **2.3.3.1 Dampak Pengangguran Terhadap Perekonomian**

Setiap negara selalu berusaha agar tingkat kemakmuran masyarakatnya dapat dimaksimumkan dan perekonomian selalu mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap dan berkelanjutan (*sustained economic growth*). Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai tujuan tersebut. Hal ini dapat dilihat jelas dari berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran. Akibat- akibat buruk pengangguran terhadap perekonomian adalah :

*Pertama*, pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimumkan tingkat kesejahteraan yang mungkin dicapainya. Pengangguran menyebabkan output aktual (*actual output*) yang dicapai lebih rendah dari atau berada dibawah output potensial (*potential output*). Keadaan ini berarti tingkat kemakmuran masyarakat yang dicapai adalah lebih rendah dari tingkat yang mungkin akan dicapainya.

*Kedua*, pengangguran menyebabkan pendapatan pajak (*tax revenue*) pemerintah berkurang. Pengangguran yang disebabkan oleh

---

rendahnya tingkat kegiatan ekonomi, pada gilirannya akan menyebabkan pendapatan pajak yang mungkin diperoleh pemerintah akan menjadi sedikit. Dengan demikian, tingkat pengangguran yang tinggi akan mengurangi kemampuan pemerintah dalam menjalankan berbagai kegiatan pembangunan.

*Ketiga*, pengangguran yang tinggi akan menghambat, dalam arti tidak akan menggalakkan pertumbuhan ekonomi. pengangguran menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sektor swasta. Pertama, pengangguran tenaga kerja biasanya akan diikuti npula dengan oleh kelebihan kapasitas mesin- mesin perusahaan. Keadaan ini jelas tidak akan mendorong perusahaan untuk melakukan investasi di masa akan datang. Kedua, pengangguran yang timbul sebagai akibat dari kelesuan kegiatan perusahaan menyebabkan keuntungan berkurang. Keuntungan yang rendah mengurangi keinginan perusahaan untuk melakukan investasi. Kedua hal tersebut jelas tidak akan menggalakkan pertumbuhan ekonomi di masa akan datang.

### **2.3.3.2 Dampak Pengangguran Terhadap Individu dan Masyarakat**

Selain membawa akibat buruk terhadap perekonomian secara keseluruhan, pengangguran yang terjadi juga akan membawa beberapa akibat buruk terhadap individu dan masyarakat, sebagai berikut :

*Pertama*, pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan. Di negara-negara maju, para penganggur

---

memperoleh tunjangan (bantuan keuangan) dari badan asuransi pengangguran, dan oleh sebab itu, mereka masih mempunyai pendapatan untuk membiayai kehidupannya. Sebaliknya di negara – negara berkembang tidak terdapat program asuransi pengangguran, dan karenanya hidup penganggur harus dibiayai oleh tabungan masa lalu atau pinjaman. Keadaan ini potensial bisa mengakibatkan pertengkaran dan kehidupan keluarga yang tidak harmonis.

*Kedua*, pengangguran dapat menyebabkan kehilangan atau berkurangnya keterampilan. Keterampilan dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek. Pengangguran dalam kurun waktu yang lama akan menyebabkan skills pekerja semakin merosot.

*Ketiga*, pengangguran dapat pula menimbulkan ketidak stabilan sosial dan politik. Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa yang tidak puas masyarakat kepada pemerintah yang berkuasa. Golongan yang berkuasa akan semakin tidak populer di mata masyarakat, dan berbagai tuntutan dan ritik akan dilontarkan kepada pemerintah dan adakalanya hal itu disertai pula dengan tindakan demonstrasi dan hura hara. Kegiatan-kegiatan kriminal seperti pencurian dan perampokan dan lain sebagainya akan semakin meningkat.

---

### 2.3.4 Hubungan Pengangguran dan Kemiskinan

Menurut *Sadono Sukirno (2004)*, efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Hubungan yang erat sekali antara tingginya jumlah pengangguran, dengan jumlah penduduk miskin. Bagi sebagian besar mereka, yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja paruh waktu (*part time*) selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin (*Lincoln Arsyad, 1999*). Kebutuhan manusia banyak dan beragam, karena itu mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, hal yang biasa dilakukan adalah bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Apabila mereka tidak bekerja atau menganggur, konsekuensinya adalah mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, kondisi ini membawa dampak bagi terciptanya dan membengkaknya jumlah penduduk miskin yang ada.

Menurut *Dian Octaviani (2001)*, jumlah pengangguran erat kaitanya dengan kemiskinan di Indonesia yang penduduknya memiliki

---

ketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini. Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Yang artinya bahwa semakin tinggi pengangguran maka akan meningkatkan kemiskinan. Kadangkala ada juga pekerja dipertanian yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik dan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan-pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber-sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka. Orang-orang seperti ini bisa disebut menganggur tetapi belum tentu miskin.

## **2.4 Inflasi**

Sebagai salah satu fenomena yang terutama terjadi di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Berbagai perdebatan baik nasional maupun regional tak henti-hentinya memperbincangkan masalah ini.

### **2.4.1 Pengertian Inflasi**

Defenisi inflasi banyak ragamnya seperti yang dapat kita temukan dengan literatur ekonomi. Keanekaragaman defenisi tersebut terjadi karena pengaruh inflasi terhadap berbagai sektor perekonomian. Hubungan yang erat dan luas antara inflasi dan berbagai sektor perekonomian tersebut melahirkan berbagai perbedaan pengertian dan persepsi kita tentang inflasi.

---

*Venieris dan Seblod (1978)* mendefenisikan inflasi sebagai suatu kecenderungan meningkatnya tingkat harga umum secara terus menerus sepanjang waktu (a sustained tendency for the general level of prices to rise over time). Sedangkan Pengertian inflasi menurut *Boediono (1982)* inflasi adalah Kecenderungan harga- harga naik secara umum dan terus menerus, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi kecuali kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga- harga barang lain. Selanjutnya Inflasi menurut *Khalwaty (2000)* inflasi merupakan suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga secara tajam (absolut) yang berlangsung terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Seirama dengan kenaikan harga- harga tersebut nilai uang turun secara tajam pula sebanding dengan kenaikan harga tersebut. Dari tersebut diatas, setidaknya ada 3 hal penting yang ditekankan yaitu :

- ✚ Adanya kecenderungan harga- harga untuk meningkat, yang berarti bisa saja tingkat harga yang terjadi pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan tendensi yang meningkat.
- ✚ Bahwa kenaikan tingkat harga tersebut berlangsung secara terus menerus (*sustained*), yang berarti bukan terjadi pada suatu waktu sajas, akan tetapi bisa beberapa waktu lamanya.

---

✚ Bahwa tingkat harga yang di maksud disini adalah tingkat harga umum, yang berarti tingkat harga yang mengalami kenaikan itu bukan hanya pada satu atau beberapa komoditi saja, akan tetapi untuk harga barang secara umum.

Berkaitan dengan pengertian inflasi ini, ada tiga hal yang perlu dipahami yaitu inflasi (*inflation*) itu sendiri, tingkat inflasi (*inflation rate*), dan indeks harga (*Price index*). Inflasi itu sendiri pada dasarnya adalah tingkat perubahan harga- harga, sedangkan tingkat inflasi adalah akumulasi dari inflasi – inflasi terdahulu, atau persentase perubahan didalam tingkat harga. Adapun indeks harga itu sendiri mengukur biaya dari sekelompok barang tertentu sebagai persentase dari kelompok yang sama pada periode dasar (*base periode*). Secara umum ada tiga indeks harga (*Nanga, 2001*) yaitu :

#### **1. Indeks Harga Konsumen (*Consumer Price Index* atau *CPI*)**

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah suatu indeks harga yang mengukur biaya sekelompok barang dan jasa di pasar termasuk harga-harga makanan pakaian, perumahan, transportasi, perawatan, kesehatan, dan komoditi lain yang dibeli untuk menunjang kehidupan sehari- hari. Dalam kasus IHK ini, indeks harga dibuat dengan menimbang setiap harga sesuai dengan arti penting secara ekonomis dari komoditi yang bersangkutan.

---

## **2. Indeks harga Produsen (*Producer Price Index* atau *PPI*)**

Indeks Harga Produsen (IHP) adalah suatu indeks dari harga bahan baku, produk antara peralatan modal,, dan mesin yang dibeli oleh sektor bisnis atau perusahaan. Jadi, PPI hanya mencakup bahan baku dan barang antara atau setengah jadi saja, sementara barang- barang jadi tidak dimasukkan didalam perhitungan.

## **3. GNP Deflator**

GNP deflator adalah suatu indeks yang merupakan perbandingan atau rasio antara GNP nominal dan GNP riil dikalikan dengan 100. GNP riil adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian, yang diperoleh ketika output dinilai dengan menggunakan harga tahun dasar. Sedangkan GNP nominal adalah GNP yang dihitung berdasarkan harga berlaku. Karena GNP deflator ini cakupannya lebih luas, dalam arti perhitungannya meliputi semua barang yang diproduksi didalam perekonomian, maka indeks ini merupakan indeks harga yang secara luas digunakan sebagai basis untuk mengukur inflasi.

### **2.4.2 Macam- Macam Inflasi**

Sehubungan dengan kompleksnya faktor yang menjadi sumber inflasi atau banyaknya variabel yang mempengaruhi maka dapat dilakukan pengelompokan terhadap macam-macam inflasi berdasarkan sudut pandang sebagai berikut:

---

#### 2.4.2.1 Inflasi Menurut Sifatnya :

Laju inflasi dapat berbeda antara satu negara dengan negara lain atau dalam negara satu untuk waktu yang berbeda. Atas dasar jenisnya, inflasi dibagi dalam tiga kategori (Nopirin ; 1987; 27) :

- a. **Inflasi Merayap** (*Creeping inflation*), yaitu inflasi yang ditandai dengan laju inflasi yang rendah kurang dari 10% per tahun. Kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase kecil serta dalam jangka waktu yang relatif lama.
- b. **Inflasi Menengah** (*Galloping Inflation*), ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar, biasanya sampai double digit atau triple digit dan kadang kala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Artinya harga- harga Minggu/ bulan ini lebih tinggi dari Minggu/ bulan lalu dan seterusnya. Efek terhadap perekonomian lebih berat daripada inflasi merayap.
- c. **Inflasi Tinggi** (*Hyper inflation*) merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Harga- harga naik sampai 5 atau 6 kali. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang semakin cepat, harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul karena pemerintah mengalami defisit anggaran belanja misalnya yang ditimbulkan oleh adanya perang yang dibelanjai atau ditutup dengan mencetak uang.

---

#### **2.4.2.2 Inflasi Menurut Asalnya :**

Ditinjau dari asal terjadinya, maka inflasi dapat dibagi menjadi dua macam (*Tajul Khalwaty, 2000*) yaitu :

##### **a. Domestic Inflation**

Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestik). Kenaikan harga disebabkan karena adanya kejutan (shock) dari dalam negeri baik karena perilaku masyarakat maupun perilaku pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan- kebijakan psikologis yang berdampak inflatoar. Kenaikan harga- harga terjadi secara absolut akibatnya terjadilah inflasi atau semakin meningkatnya angka (laju) inflasi

##### **b. Import Inflation**

Inflasi yang terjadi dalam negeri karena adanya pengaruh kenaikan harga dari luar negeri. kenaikan harga dalam negeri terjadi karena kenaikan harga dari luar negeri terutama barang- barang impor atau kenaikan bahan baku industri yang masih belum dapat diproduksi dalam negeri.

#### **2.4.2.3 Inflasi Menurut Sumber Penyebab :**

Didasarkan pada sumber penyebabnya, inflasi dapat digolongkan sebagai berikut (*Soediyono; 1992*):

##### **a. Inflasi Desakan Biaya (*Cost – Push inflation*)**

Inflasi dorongan biaya atau sering disebut inflasi sisi penawaran atau inflasi karena guncangan penawaran (*supply-shock inflation*). Inflasi yang timbul karena berkurangnya penawaran agregatif. Inflasi ini terjadi

---

jika biaya- biaya mendesak harga- harga naik pada periode di mana sumber daya tidak dipergunakan secara penuh .

**b. Inflasi Tarikan Permintaan (*Demand- pull inflation*)**

Inflasi ini timbul sebagai akibat daripada meningkatnya permintaan agregatif. Inflasi ini terjadi karena banyaknya peredaran uang yang berhadapan dengan terbatasnya barang-barang yang dihasilkan dalam keadaan full employment. Dan apabila terlalu banyak permintaan atas barang yang terlalu sedikit maka harga akan melonjak tajam.

**c. Inflasi Struktural (*Structural Inflation*)**

Inflasi ini terjadi sebagai akibat dari adanya berbagai kendala atau kekuatan struktural (*struktural rigidities*) yang menyebabkan penawaran didalam perekonomian menjadi kurang atau tidak responsif terhadap permintaan yang meningkat

**2.4.3 Dampak Inflasi**

Inflasi yang terjadi di dalam suatu perekonomian memiliki beberapa dampak atau akibat sebagai berikut :

*Pertama*,inflasi dapat mendorong terjadinya redistribusi pendapatan diantara anggota masyarakat, dan inilah yang disebut efek redistribusi dari inflasi (*Redistribution effect of inflation*). hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dari anggota masyarakat, sebab redistribusi pendapatan yang terjadi akan menyebabkan pendapatan riil satu orang meningkat, tetapi pendapatan riil orang lainnya jatuh. Namun parah atau tidaknya dampak inflasi terhadap redistribusi pendapatan dan kekayaan

---

tersebut adalah sangat tergantung pada apakah inflasi tersebut dapat diantisipasi (*anticipated*) ataukah tidak dapat diantisipasi sebelumnya (*unanticipated*). Inflasi yang tidak dapat diantisipasi sudah tentu akan mempunyai dampak atau akibat yang jauh lebih serius terhadap redistribusi pendapatan dan kekayaan, dibandingkan dengan inflasi yang dapat diantisipasi.

*Kedua*, inflasi dapat menyebabkan penurunan dalam efisiensi ekonomi

(*Economic efficiency*). Hal ini terjadi karena inflasi dapat mengalihkan sumberdaya dari investasi yang produktif (*productive Investment*) ke investasi yang tidak produktif (*unproductive investment*) sehingga mengurangi kapasitas ekonomi produktif. Ini yang disebut "*efficiency effect of inflation*".

*Ketiga*, inflasi juga dapat menyebabkan perubahan-perubahan didalam output dan kesempatan kerja (*employment*), dengan cara yang lebih langsung yaitu dengan memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukan, dan juga memotivasi orang untuk bekerja lebih atau kurang dari yang telah dilakukan selama ini. ini disebut "*output and employment effect of inflation*".

*Keempat*, inflasi dapat menciptakan suatu lingkungan yang tidak stabil

(*unstable environment*) bagi keputusan ekonomi. Jika sekiranya konsumen memperkirakan bahwa tingkat inflasi di masa mendatang akan

---

naik, maka akan mendorong mereka untuk melakukan pembelian barang-barang dan jasa secara besar-besaran pada saat sekarang ketimbang mereka menunggu dimana tingkat harga sudah meningkat lagi. Begitu pula halnya dengan bank, atau lembaga peminjaman (*lenders*) lainnya, jika sekiranya mereka menduga bahwa tingkat inflasi akan naik dimasa mendatang, maka mereka akan mengenakan tingkat bunga yang tinggi atas pinjaman yang diberikan sebagai langkah proteksi dalam menghadapi penurunan pendapatan riil dan kekayaan (*losses of real income and wealth*) (Bradley, 1985:95).

#### **2.4.4 Hubungan Inflasi Dan Kemiskinan**

Badan Pusat Statistik (BPS) Tingginya laju inflasi bisa menaikkan ukuran garis kemiskinan. Peralnya, harga barang dan jasa menjadi salah satu penentu tolok ukur garis kemiskinan. Kenaikan inflasi pasti akan menaikkan garis kemiskinan. Sebab, garis kemiskinan juga ditentukan oleh harga barang dan jasa, hanya memang bobotnya berbeda., kenaikan laju inflasi serta ukuran garis kemiskinan, tidak serta-merta menaikkan atau menurunkan angka kemiskinan. Sebab, angka kemiskinan juga dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan dan efektivitas beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah. Inflasi tidak selalu berdampak buruk bagi perekonomian, terutama inflasi yang terkendali justru dapat meningkatkan kegiatan perekonomian, namun salah satu akibat yang ditimbulkan inflasi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat antara lain, menurunnya daya beli masyarakat .

---

## 2.5 Konsep Pengeluaran

*Sadono sukirno(2000)*, Banyak alasan yang menyebabkan analisis makro ekonomi perlu memperhatikan tentang konsumsi rumah tangga secara mendalam. Alasan pertama, konsumsi rumah tangga memberikan pemasukan kepada pendapatan nasional. Di kebanyakan negara pengeluaran konsumsi sekitar 60-75 persen dari pendapatan nasional. Alasan yang *kedua*, konsumsi rumah tangga mempunyai dampak dalam menentukan fluktuasi kegiatan ekonomi dari satu waktu ke waktu lainnya. Konsumsi adalah pembelanjaan atas barang-barang dan jasa-jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan tersebut. Pembelanjaan masyarakat atas makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan mereka yang lain digolongkan pembelanjaan atau konsumsi. Barang-barang yang di produksi untuk digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dinamakan barang konsumsi. (*Dumairy,1996*). Komposisi pengeluaran penduduk dapat dijadikan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Semakin kecil pengeluaran penduduk untuk konsumsi makanan merupakan indikasi tingkat kesejahteraan yang semakin baik. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan Makanan berkaitan erat dengan tingkat pendapatan masyarakat. Di negara yang sedang berkembang, pemenuhan kebutuhan makanan masih menjadi prioritas utama, karena untuk memenuhi kebutuhan gizi. ( BPS).

---

### 2.5.1 Konsumsi/ Pengeluaran

Konsumsi adalah pembelanjaan atas barang-barang dan jasa-jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan tersebut. Pembelanjaan masyarakat atas makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan mereka yang lain digolongkan pembelanjaan atau konsumsi. Barang-barang yang diproduksi untuk digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dinamakan barang konsumsi (*Dumairy, 2004*).

Pengeluaran konsumsi seseorang adalah bagian dari pendapatan yang dibelanjakan. Apabila pengeluaran-pengeluaran konsumsi semua orang dalam suatu negara dijumlahkan, maka hasilnya adalah pengeluaran konsumsi masyarakat negara yang bersangkutan. Menurut *Rahardja (2001)*, pengeluaran konsumsi terdiri atas konsumsi pemerintah (*government consumption*) dan konsumsi masyarakat atau rumah tangga (*household consumption*). Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah semua pembelian barang dan jasa oleh rumah tangga yang tujuannya untuk dikonsumsi selama periode tertentu dikurangi neto penjualan barang bekas. Untuk menduga pengeluaran konsumsi rumah tangga digunakan data pendukung antara lain:

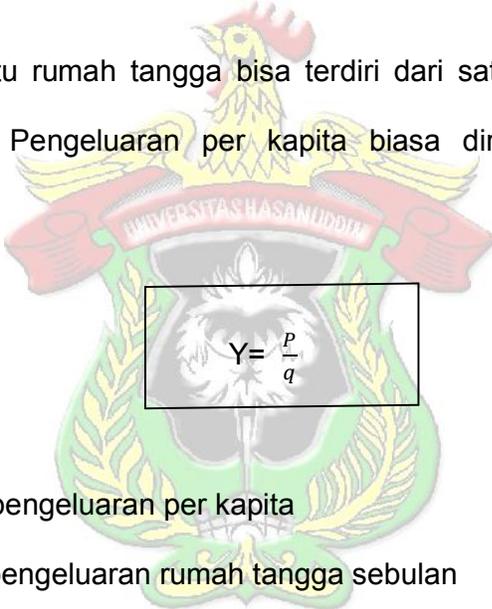
1. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan kelompok makanan dan bukan makanan.
2. Indeks harga konsumen (IHK) untuk masing-masing kelompok komoditi dan jasa dari bagian statistik harga konsumen.

---

3. Jumlah penduduk dari proyeksi hasil survey penduduk antar sensus.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengeluaran rata-rata perkapita sebulan menunjukkan besarnya pengeluaran setiap anggota rumah tangga dalam kurun waktu satu bulan. Sedangkan definisi rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur (BPS 2003).

Dalam satu rumah tangga bisa terdiri dari satu, dua, atau lebih kepala keluarga. Pengeluaran per kapita biasa dirumuskan sebagai berikut:


$$Y = \frac{P}{q}$$

Dimana:

y = pengeluaran per kapita

p = pengeluaran rumah tangga sebulan

q = jumlah anggota rumah tangga

Penghitungan pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu:

- 1). Pengeluaran konsumsi rumah tangga di pasar suatu daerah adalah pembelian langsung di pasar tersebut baik oleh penduduk maupun rumah tangga bukan penduduk daerah tersebut (staf kedutaan asing dan turis domestik maupun asing).

- 
- 2). Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang diberikan kepada pihak lain

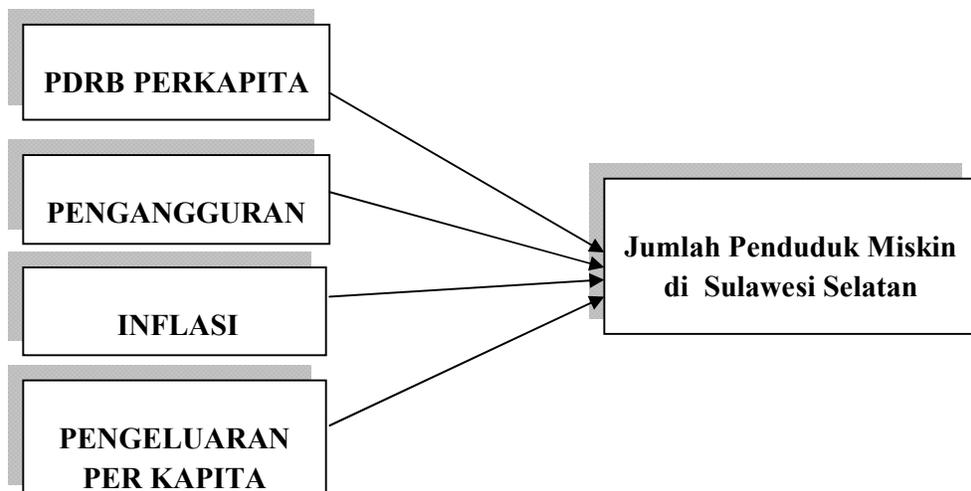
### 2.5.2 Hubungan Konsumsi Perkapita terhadap kemiskinan

Besar kecilnya proporsi pengeluaran merupakan salah satu cerminan kesejahteraan penduduk. Hal ini sesuai dengan teori Hukum Engel yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi pengeluaran bukan makanan biasanya diidentikkan dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Namun sebaliknya, semakin besar proporsi pengeluaran makanan merefleksikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin menurun.

### 2.6 Kerangka Pemikiran

Sehubungan dengan pemikiran ini, penulis membuat kerangka pemikiran yang dapat menggambarkan ruang lingkup penelitian ini sebagaimana tergambar pada gambar berikut ini:

**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**



---

Pada gambar 2.1 di atas dijelaskan bahwa jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu PDRB perkapita, Pengangguran, Inflasi, dan Pengeluaran perkapita. PDRB perkapita memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat diberbagai negara dan juga dapat menggambarkan perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi di antara berbagai negara (*Lincoln Arsyad, 1999*). Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah (*Thamrin, 2000*). Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin berkurang.

Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan *Sadono Sukirno (2004)*.

Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus, salah satu akibat yang ditimbulkan inflasi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat antara lain, menurunnya daya beli masyarakat . Hal ini menyebabkan penduduk miskin sulit

---

diidentikkan dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Namun sebaliknya, semakin besar proporsi pengeluaran makanan merefleksikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin menurun. memenuhi kebutuhan sehari harinya, sehingga Jumlah penduduk miskin semakin bertambah

Besar kecilnya proporsi pengeluaran merupakan salah satu cerminan kesejahteraan penduduk semakin besar proporsi pengeluaran bukan makanan biasanya

## 2.7 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau kesimpulan sementara terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian, yang kebenarannya masih perlu dibuktikan atau di uji secara empiris.

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka hipotesisnya adalah :

- ✚ Diduga bahwa PDRB perkapita mempunyai pengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan
- ✚ Diduga bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan
- ✚ Diduga bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan
- ✚ Diduga bahwa Pengeluaran perkapita berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan.